

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi *stakeholder*, yang terlibat termasuk aktor primer meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR), BAPPEDA, dan DPRD yang memiliki pengaruh serta kepentingan tinggi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan pariwisata. Aktor sekunder terdiri atas pelaku usaha, BUMN yang memiliki pengaruh cukup besar namun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan strategis. Aktor tersier meliputi POKDARWIS, UMKM, komunitas wisata, dan masyarakat yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh relatif rendah. Sementara itu, aktor kuartier terdiri atas wisatawan dan pihak lain yang terdampak oleh kebijakan pariwisata namun memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang relatif rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dan kepentingan antar *stakeholder* belum berjalan secara seimbang sehingga masih terdapat dominasi aktor pemerintah dalam proses pengembangan pariwisata.

Stakeholder telah menjalankan berbagai peran sebagai *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator*. DISBUDPAR berperan dominan sebagai pembuat kebijakan dan koordinator utama pengembangan pariwisata. BAPPEDA berperan dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan, sedangkan DPRD menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran. Pelaku usaha, BUMN, media, dan komunitas berkontribusi sebagai fasilitator dan akselerator melalui promosi, investasi, pelatihan, serta pendampingan. Namun demikian,

peran *stakeholder* belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan ketimpangan peran antara aktor yang memiliki kewenangan tinggi dengan aktor pelaksana di lapangan, khususnya POKDARWIS dan UMKM yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan akses dukungan. Selain itu, koordinasi antar *stakeholder* belum terintegrasi secara efektif sehingga implementasi program pariwisata masih berjalan secara parsial dan sektoral.

Faktor pendukung pengembangan pariwisata meliputi adanya komitmen bersama untuk memajukan sektor pariwisata, dukungan regulasi yang memberikan legitimasi kepada DISBUDPAR, intensitas komunikasi antar *stakeholder* melalui berbagai forum koordinasi, serta kepercayaan yang terbangun dalam beberapa bentuk kerja sama. Selain itu, tingginya potensi wisata Kota Semarang dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi modal penting dalam mendorong kolaborasi *stakeholder*.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata Kota Semarang masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang menyebabkan peran *stakeholder* belum berjalan optimal. Hambatan tersebut meliputi perbedaan nilai dan orientasi antar *stakeholder*, khususnya antara pendekatan *Quality Tourism* dengan target kinerja berbasis kuantitas, komunikasi yang belum terintegrasi, tingkat kepercayaan yang belum merata, fragmentasi kebijakan antar organisasi perangkat daerah, serta ketimpangan sumber daya dan anggaran. Selain itu, belum adanya otoritas yang mampu mengintegrasikan seluruh *stakeholder* menyebabkan koordinasi dan implementasi kebijakan pariwisata belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dinamika hubungan antar *stakeholder* yang ditandai oleh perbedaan kepentingan, pengaruh, dan sumber daya. Meskipun kolaborasi semakin berkembang melalui pemanfaatan komunikasi digital, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatnya partisipasi *stakeholder* non-pemerintah, pemerintah masih menjadi aktor dominan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat tarik-menarik kepentingan antara orientasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan orientasi keberlanjutan yang menekankan kualitas destinasi dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya merupakan proses pelaksanaan program, tetapi juga proses negosiasi kepentingan dan distribusi pengaruh antar *stakeholder*.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata Kota Semarang tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan berbagai *stakeholder*, tetapi juga oleh kualitas hubungan yang terbangun di antara mereka. Efektivitas komunikasi, tingkat kepercayaan, keselarasan nilai, dan integrasi kebijakan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi *stakeholder* non-pemerintah, serta integrasi kebijakan dan pemerataan akses sumber daya agar pengembangan pariwisata Kota Semarang dapat berjalan lebih kolaboratif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

5.1 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, berikut adalah saran yang dirumuskan untuk meningkatkan peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang, sehingga kedepannya lebih optimal :

1. Penguatan Koordinasi oleh DISBUDPAR

Perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi, seperti forum rutin lintas *stakeholder* atau collaborative platform, serta penegasan peran DISBUDPAR sebagai koordinator utama agar sinkronisasi program antar OPD dan *stakeholder* dapat berjalan lebih efektif.

2. Peningkatan Kemandirian POKDARWIS

Pemerintah perlu mendorong kemandirian POKDARWIS melalui pelatihan manajemen destinasi, penguatan kapasitas SDM, serta pengurangan ketergantungan terhadap pendampingan pemerintah secara bertahap.

3. Penguatan Peran UMKM Secara Berkelanjutan

Diperlukan strategi pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berbasis *event*, tetapi juga berkelanjutan, seperti integrasi UMKM dalam rantai nilai pariwisata, pengembangan produk unggulan, serta akses pemasaran digital yang lebih luas.

4. Pemerataan Infrastruktur oleh DPUPR

DPUPR perlu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya aksesibilitas menuju destinasi wisata, agar mendukung kenyamanan kunjungan wisatawan.

5. Penyelarasan Nilai dan Kebijakan

Perlu dilakukan harmonisasi antara target kuantitatif (IKU) dan pendekatan *Quality Tourism*, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana dan dapat menciptakan arah kebijakan yang lebih konsisten.

6. Penguatan Sistem Komunikasi dan Transparansi Data

Diperlukan pengembangan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi dan transparan agar distribusi data dan informasi dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* secara merata.

7. Peningkatan Kepercayaan Antar *Stakeholder*

Pemerintah perlu meningkatkan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, memperbaiki sistem pengaduan, serta membangun komunikasi yang lebih terbuka guna memperkuat kepercayaan publik.

8. Integrasi Kebijakan dan Kelembagaan

Perlu adanya penguatan integrasi antar OPD melalui kejelasan pembagian kewenangan, serta optimalisasi peran BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan.